



DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA --- 2023

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor ...Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023, sehingga

dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
10. Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2); dan
13. Peraturan Walikota Yogyakarta No 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
14. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2023;
3. Pedoman bagi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKPA Perangkat Daerah) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilakukan atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2023 pada triwulan II. Secara rinci review tersebut tergambar selanjutnya pada Tabel 2.1. Yang akan dijelaskan pada bab ini adalah program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan bidang urusan perindustrian, koperasi dan UKM beserta program dan kegiatan penunjang.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 9 (delapan) kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di mana target yang ingin dicapai adalah nilai A dan Pendapatan UPT Logam sebesar Rp 440.000.000. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 3.017.500.592 dari target Triwulan II sebesar Rp 4.520.997.814 (73,73%).

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 95,18% dari target fisik renja sebesar 60,28%, berhasil direalisasikan sebesar 57,38%. Terdapat 8 (delapan) kegiatan di dalam program tersebut, antara lain:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) output, yakni Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 4 dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD, dengan target 1 dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah dokumen Perubahan

- RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, dengan target 1 dokumen
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD, dengan target 1 dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD, memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, dengan target 1 dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sub kegiatan ini memiliki 1 (satu) output yakni Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 1 laporan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terdapat 1 (satu) output pada sub kegiatan ini yakni Jumlah orang uang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 33 orang/bulan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan output Jumlah okumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD. Target output ini sejumlah 1 dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 1 laporan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Target output ini sejumlah 12 laporan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Sub kegiatan ini memiliki output yakni Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD, dengan target 1 dokumen
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dengan target 2 laporan
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yakni Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, dengan target 5 dokumen.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yakni :
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, dengan target 6 paket.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, dengan target 2 paket
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, dengan target 2 dokumen
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan target 3 laporan
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yakni
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah paket mebel yang disediakan, dengan target 2 unit
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, dengan target 1 unit.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yakni :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat, dengan target 2 laporan
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, dengan target 2 laporan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, dengan target 6 laporan
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya, dengan target 1 unit
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 20 unit
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 unit
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri . Program ini memiliki satu indikator kinerja program yakni Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi, ditargetkan sebesar 3 % dan terealisasi sebesar 6,2 %.
- a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam.

3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari satu kegiatan yakni Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yakni Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program ini terdiri dari satu nomenklatur kegiatan dan satu sub kegiatan yakni Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik. Target indikator ini sebanyak 115 koperasi. Kemajuan keuangan hingga triwulan II tahun berjalan sebesar Rp 20.914.000 atau 86,55% dari target sebesar Rp 24.163.000. Sedangkan kemajuan fisik sebesar 15,84%, sesuai dengan target fisik pada triwulan II. Dengan demikian tingkat kinerja fisik program ini sebesar 100%.

Program ini terdiri satu kegiatan yakni Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Nomenklatur kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 115 unit usaha

6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi memiliki satu indikator kinerja yakni Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapatkan penilaian sehat. Target indikator kinerja ini adalah 115 koperasi dan

terrealisasi 115 koperasi. Kemajuan keuangan hingga triwulan II sebesar Rp 11.486.000 atau sebesar 75,42% dari target sebesar Rp 15.229.000. Sedangkan kemajuan fisik program ini sebesar 52,65%, sesuai dengan target fisik pada triwulan II tahun berjalan. Dengan demikian tingkat realisasi fisik program ini sebesar 100 %.

Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan antara lain:

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini memiliki satu output yakni Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang menyangkut 115 koperasi.
- Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan, dengan target sebesar 20 koperasi.

7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja program yakni Jumlah SDM Koperasi yang memiliki kompetensi. Target indikator kinerja ini sebanyak 540 orang. Kemajuan fisik program ini sebesar 66%, sesuai dengan target pada triwulan II. Sedangkan kemajuan keuangan mencapai Rp 190.945.000 atau sebesar 99,74% dari target realisasi keuangan pada triwulan II sebesar Rp 191.441.000.

Program ini memiliki satu kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari satu sub kegiatan yakni Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian, dengan target sebesar 540 orang.

8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memiliki satu indikator kinerja program yakni jumlah koperasi yang berkembang usahanya. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 15 koperasi. Kemajuan fisik program ini pada triwulan II mencapai 34%, sedikit dibawah target yang ditetapkan untuk triwulan II yakni 35%. Dengan demikian tingkat realisasi fisik pada triwulan II sebesar 97,14%.

Sedangkan kemajuan keuangan mencapai Rp 91.390.750, atau 81,77% dari target keuangan triwulan II sebesar Rp 111.759.750.

9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini memiliki 2 (dua) output antara lain Jumlah UKM ber-NIB dengan target 400 UKM dan Jumlah Wirausaha Baru yang ditumbuhkan dengan target 100 wirausaha. Kemajuan fisik program ini pada triwulan II sebesar 53%, sesuai dengan target fisik pada triwulan II. Sedangkan kemajuan keuangan program ini mencapai Rp 296.993.500, atau sebesar 95,20% dari target keuangan pada triwulan II yakni Rp 306.882.500.
10. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Kemajuan fisik program ini mencapai 52,56%, sedikit dibawah target fisik pada triwulan II yakni 60,66%. Dengan demikian tingkat capaian fisik program ini sebesar 86,65%. Sedangkan kemajuan keuangan Rp 122.282.000, atau 26,12% dari target keuangan triwulan II sebesar Rp 468.102.000.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan capaian kinerja pelayanan bidang perindustrian, koperasi dan UMKM telah melampaui yang ditargetkan.

Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	0	30 koperasi	0	41 k
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0		152.227.000,00	15,84%	24.163.000,00	
				0 Koperasi		0 Koperasi		115 Koperasi		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja												
Predikat kinerja												

Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	0	30 koperasi	0	41 k
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	115 Koperasi	11.800.000,00	99,00%	11.600.000,00	
	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	0 Koperasi	0	0 Koperasi	0	20 Koperasi	59.280.000,00	6,30%	3.629.000,00	
Rata-rata capaian kinerja												
Predikat kinerja												
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n	765,00 orang	0	490,00 orang	0	540,00 orang	0	540 orang	0	540
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan			0		0		290.809.523,00	66,00%	191.441.000,00	

		Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0 orang	0 orang	540 orang		66,00%			
Rata-rata capaian kinerja												
Predikat kinerja												
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = jumlah koperasi yang berkembang usahanya tahun n		0	15,00 unit	0	12,00 unit	0	0 unit	0	0 unit
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0		343.064.250,00	35,00%	111.759.750,00		
					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	12 Unit Usaha		35,00%			

Rata-rata capaian kinerja												
Predikat kinerja												
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)		Jumlah UKM ber-NIB			0	410	0	400	0	110	0
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	100,00 wirausaha	0	110,00 wirausaha	0	100,00 wirausaha	0	50	0
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui PendataanKemitraanKemudahan PerizinanPenguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan												
	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, pngiatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			0		0		161.847.160,00	40,00%	63.615.000,00
					0 Unit		0 Unit		3.600 Unit		40,00%	
	2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan			0		0		12.652.500,00	100,00%	12.652.500,00
					0 Unit Usaha		0 Unit Usaha		400 Unit Usaha		100,00%	

			Perizinan										
		3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0		0		369.307.019,00	66,00%	230.615.000,00
			Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro			0 Wirausaha Baru		0 Wirausaha Baru		100 Wirausaha Baru		66,00%	
Rata-rata capaian kinerja													
Predikat kinerja													
Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Jumlah UKM Mandiri	Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan inovasi	50,00 UMKM	0	30,00 UMKM	0	35,00 UMKM	0	0 UMKM	0	UM
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil													
		1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi				0		0		844.220.955,00	60,66%	468.102.000,00
			Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolaham, pemasaran, SDM serta desain dan			0 UMKM		0 UMKM		265 UMKM		0,00%	

			teknologi										
Rata-rata capaian kinerja													
Predikat kinerja													
Meningkatnya Kinerja sektor industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	26,00%	0	6,29%	0	11,00%	0	4% %	0	4%	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
	1	KoordinasiSinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				0		0		524.585.750,00	42,42%	222.475.000,00
							0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	0,00%	
	2	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan				0		0		75.495.000,00	44,95%	30.040.000,00
							0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	0,00%	

			Prasarana Industri										
		3	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			0		0		291.004.500,00	52,68%	137.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		
		4	KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Logam			0		0		3.932.595.750,00	53,72%	2.076.202.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja													
Predikat kinerja													
Meningkatnya Kinerja sektor industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berizin industri	(Jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	4,50%	0	0	0	3,00%	0	0.5% %	0	0.5%	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)Izin Perluasan Usaha Industri (IPI)Izin Usaha Kawasan Industri (IUKIdan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan				0		0		9.060.000,00	0,00%	0	

		di Bidang Industri Dalam Lingkup IUIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota											
						0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen			0,00%	
Rata-rata capaian kinerja														
Predikat kinerja														
Meningkatnya Kinerja sektor industri	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	0%	0	0	0
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota														
	1	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			0		0		49.811.250,00		1,00%	500.000,00	
						0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		

Rata-rata capaian kinerja												
Predikat kinerja												
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	0	A nilai	0
			Pendapatan UPT Logam			0		0		0	223.802.500	0
PerencanaanPenganggaranandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	3.000.000,00	80,00%	2.351.000,00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	730.250,00	10,00%	0
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	514.000,00	10,00%	0

			Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		0		835.000,00	25,00%	100.000,00
			Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		0		580.000,00	10,00%	0
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10,00%	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		492.500,00	50,00%	227.500,00
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0		0		4.946.867.850,00	76,00%	3.691.515.064,00

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	33 Orang/bulan		76,00%		
	8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	0		610.000,00	45,00%	235.000,00	
		Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		45,00%		
	9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0		612.500,00	46,00%	227.500,00	
		Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		46,00%		
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0		500.000,00	0,00%	0	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		0,00%		
	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	0		1.547.500,00	50,00%	722.500,00	
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan		50,00%		

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
	12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		500.000,00	100,00%	500.000,00
		Dokumen RKBMD SKPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%	
	13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		500.000,00	100,00%	500.000,00
		Laporan Penatausahaan BMD SKPD			0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
	14	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		0		500.000,00	100,00%	500.000,00
		Dokumen Monitoring, Evaluasi dan PKP			0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		100,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		70.177.100,00	89,00%	62.427.100,00
		Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia			0 Paket		0 Paket		5 Paket		89,00%	
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0		0		17.314.250,00	71,10%	12.314.250,00
		Barang Cetak dan Penggandaan			0 Paket		0 Paket		2 Paket		71,10%	
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0		1.980.000,00	50,00%	990.000,00
		Bahan Bacaan			0 Eksemplar		0 Eksemplar		2 Eksemplar		50,00%	
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		0		147.530.000,00	31,66%	46.740.000,00
		Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD			0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		0,00%	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	19	Pengadaan Mebel			0	0		4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00		
		Belanja Mebel		0 unit	0 unit	2 unit			100,00%			
	20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0		11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00		
		Pengadaan Notebook		0 unit	0 unit	1 unit			100,00%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0		1.000.000,00	50,00%	500.000,00		
		laporan penyediaan surat menyurat		0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan			50,00%			
	22	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0	0		13.960.000,00	85,82%	11.980.000,00		
		Belanja Tagihan Telepon dan Pemeliharaan Genset		0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan			0,00%			
	23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0	0		551.240.000,00	44,84%	247.270.000,00		
		Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan			0,00%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	0		20.819.000,00	77,70%	15.892.000,00		
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit	0 unit	1 unit			77,70%			
	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	0		118.257.500,00	63,99%	73.870.000,00		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas		0 unit	0 unit	20 unit			0,00%			

			Roda 2 dan Roda 4										
	26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		74.000.000,00	100,00%	74.000.000,00	
		Terpeliharanya Gedung Kantor			0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		
Peningkatan Pelayanan BLUD													
	27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam				0		0		440.000.000,00	61,55%	262.935.900,00	
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			0 Unit Kerja		0 Unit Kerja		1 Unit Kerja		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja													
Predikat kinerja													
Total anggaran dari seluruh program											0		0
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%)													
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10)													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Pemahaman UKM promosi meningkat 2. Pelaksanaan kegiatan berkaitan positif dengan pelaksanaan kegiatan lain. 3. Kapasitas produksi IKM meningkat										
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Usaha yang dijalankan merupakan sampingan. 2. Adanya sarana produksi yang belum berjalan maksimal										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:										

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu indikatif. Secara keseluruhan pagu indikatif belanja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang semula sebesar Rp 13.557.028.107 pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Tahun 2023 menjadi Rp 16.034.475.864 ada kenaikan sebesar Rp 2.423.829.757. Penambahan anggaran dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain alokasi gaji dan tunjangan pegawai bulan November dan Desember, serta penyesuaian 8 orang CPNS menjadi PNS, belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kerja, pemeliharaan gedung, kendaraan dan peralatan/mesin, pelaksanaan pameran, pelatihan, promosi IKM/UKM/Koperasi.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni APBD Tahun 2023 pada program ini sebesar Rp 5.989.267.450 naik Rp 1.135.909.507 menjadi Rp 7.125.176.957. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai:

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.987.000 dari anggaran murni sebesar Rp 6.151.750. Pada anggaran perubahan 2023, anggaran kegiatan ini menjadi Rp 8.138.750. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan. Terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami peningkatan anggaran, antara lain
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini pada APBD Murni 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.000.000. Anggaran ini bertambah Rp 1.202.000 menjadi Rp 4.202.000.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD. Pada APBD Murni 2023 sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp

- 835.000. Anggaran tersebut bertambah Rp 125.000 menjadi Rp 960.000
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang dialokasikan pada sub kegiatan ini melalui APBD Murni 2023 sebesar Rp 492.500
- j. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 4.950.137.850. Rada rancangan APBD Perubahan 2023, alokasi tersebut bertambah Rp 742.956.999 menjadi Rp 5.693.094.849. Terdapat 3 sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran pada kegiatan ini.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target 1dokumen
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Target output ini sejumlah 12 laporan.
- k. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini mengalami penurunan anggaran. Alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 1.000.000. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, antara lain
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Sub kegiatan ini memiliki output yakni Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD, dengan target 1 dokumen
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dengan target 2 laporan
- l. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini tidak mengalami perubahan. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai, dengan alokasi anggaran Rp 500.000.
- m. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 244.589.350, anggaran tersebut naik Rp 7.588.000 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 237.001.350. Penambahan anggaran terjadi pada 2 sub kegiatan yakni :

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 21.314.250, naik Rp 4.000.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 17.314.250.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 151.118.000, bertambah Rp 3.588.000 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 147.530.000
- n. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 243.818.000, anggaran tersebut naik Rp 228.618.000 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 15.200.000. Penambahan anggaran terjadi pada 2 sub kegiatan yakni :
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 49.839.500, bertambah Rp 45.639.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 4.200.000
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 193.978.500, bertambah Rp 182.978.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 11.000.000
- o. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 558.038.000, anggaran tersebut turun Rp 8.162.000 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 566.200.000. Pengurangan anggaran terjadi pada tiga sub kegiatan, yakni :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 750.000, turun Rp 250.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 1.000.000.
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 12.596.000, turun Rp 1.364.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 12.596.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 544.692, turun Rp 6.548.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 544.692.000.

- p. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 376.012.008, anggaran tersebut naik Rp 162.935.508 dari alokasi anggaran APBD Murni 2023 sebesar Rp 213.076.500. Penambahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan yakni:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 22.729.800, bertambah Rp 1.910.800 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 20.819.000.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 122.100.000, bertambah Rp 3.842.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 118.257.500.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 231.182.208, bertambah Rp 157.182.208 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 74.000.000.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 208.111.000, naik sebesar Rp 55.884.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 152.227.000.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 71.080.000 tidak mengalami perubahan dari alokasi pada APBD Murni 2023.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 350.100.523, naik sebesar Rp 59.291.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 290.809.523.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 604.515.750, naik sebesar Rp 261.451.500 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 343.064.250.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 611.106.679, naik sebesar Rp 67.300.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 253.806.679. Program ini terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan. Terdapat satu kegiatan yang mengalami penambahan anggaran yakni Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

7. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 1.182.220.955, naik sebesar Rp 338.000.000 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 844.220.955. Program ini terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan.

8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri .

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 5.383.292.750, naik sebesar Rp 559.611.750 dari alokasi pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 4.823.681.000. Program ini terdiri dari satu kegiatan yakni Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota. Terdapat empat sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, antara lain :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 830.044.750, bertambah Rp 305.459.000 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 524.585.750.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Alokasi anggaran sub kegiatan ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 242.742.500, bertambah Rp 167.247.500 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 75.495.000.
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Sub kegiatan ini diampu oleh Bidang Industri dan UPT Logam. Sub kegiatan yang diampu oleh Bidang Industri mendapatkan alokasi anggaran Rp 290.944.500 pada Perubahan Renja 2023, turun sebesar Rp 60.000 dari alokasi APBD Murni 2023 sebesar Rp 291.004.500. sedangkan sub kegiatan yang diampu oleh UPT Logam mendapatkan alokasi anggaran Rp 4.019.561.000 pada Perubahan Renja 2023, naik

sebesar Rp 86.965.250 dari alokasi anggaran pada APBD Murni 2023 sebesar Rp 3.932.595.750.

9. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.**

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 9.060.000 tidak mengalami perubahan dari alokasi pada APBD Murni 2023.

11. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.**

Alokasi anggaran program ini pada Perubahan Renja 2023 sebesar Rp 49.811.250 tidak mengalami perubahan dari alokasi pada APBD Murni 2023.

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tokol Ukur	Target			
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah										
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000	4.202.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3.300.000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	730.250	730.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1.300.000
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	514.000	514.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	835.000	960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	1.300.000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	580.000	580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	16 Dokumen	16 Dokumen	492.500	1.152.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2.300.000
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	7 Laporan	7 Laporan	4.946.867.850	5.689.187.349	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	6.355.400.205
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	610.000	690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	612.500	612.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	500.000	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000

2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan administrasi keuangan Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.547.500	2.105.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	3.872.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	1.000,000	986,000			1.000,000
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	500.000	491.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan administrasi barang milik daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	500.000	495.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	500,000	500,000			500,000
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	237.001,350	244.589,350			186.354,150
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Paket	6 Paket	5 Dokumen	5 Dokumen	70.177,100	70.177,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	88.133.750
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Paket	2 Paket	5 Dokumen	5 Dokumen	17.314.250	21.314.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	19.500.000
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.980.000	1.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2.200.000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan administrasi umum yang tersusun	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	3 Laporan	3 Laporan	5 Dokumen	5 Dokumen	147.530.000	151.118.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	76.520.400

2	17	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										15,200,000	243,818,000				185,000,000		
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Barang yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 unit	2 unit	6 Jenis	6 Jenis	4,200,000	49,839,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	0
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barang yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	6 Jenis	6 Jenis	11,000,000	193,978,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	185,000,000
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										566,200,000	558,038,000				732,882,876		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	1,000,000	750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	2,000,000
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Laporan	2 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	13,960,000	12,598,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	4,200,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jasa penunjang urusan yang tersedia	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	6 Laporan	6 Laporan	3 Jenis	3 Jenis	551,240,000	544,692,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	726,682,876
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										213,076,500	376,012,008				271,517,500		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Barang yang terpelihara	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	5 Jenis	5 Jenis	20,819,000	22,729,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	21,828,400
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barang yang terpelihara	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	20 Unit	20 Unit	5 Jenis	5 Jenis	118,257,500	132,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	149,689,100
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barang yang terpelihara	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Unit	1 Unit	5 Jenis	5 Jenis	74,000,000	231,182,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai	100,000,000

[Type here]

[Type here]

[Type here]

2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								152.227,000	208.111,000				195.871,944	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								152.227,000	208.111,000				195.871,944	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kamandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kamandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang diawasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit	115 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi	195.871,944
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								71.080,000	71.080,000				82.546,200	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								71.080,000	71.080,000				82.546,200	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi yang dinilai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Koperasi	115 Koperasi	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit	115 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	68.086,700
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi yang dinilai	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Koperasi	115 Koperasi	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	115 Unit	115 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi	14.459,500
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								290.809,523	350.100,523				349.303,006	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								290.809,523	350.100,523				349.303,006	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	SDM Koperasi yang terdidik	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	540 SDM Koperasi	540 SDM Koperasi	540 Orang	540 Orang	540 Orang	540 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	540 SDM Koperasi	349.303,006
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								343.064,250	604.515,750				329.394,862	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								343.064,250	604.515,750				329.394,862	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang terbina	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	12 Unit	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	12 Unit	12 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	12 Unit	329.394,862
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								543.806,679	611.106,679				576.317,232	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								543.806,679	611.106,679				576.317,232	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku usaha yang terbina	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 UKM 100 UKM	400 UKM 100 UKM	3600 Unit Usaha	3600 Unit Usaha	620 Orang	620 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	223.387,732
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Pelaku usaha yang terbina	Sema Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 UKM 100 UKM	400 UKM 100 UKM	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	620 Orang	620 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	22.929,500
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pelaku usaha yang terbina	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 UKM 100 UKM	400 UKM 100 UKM	100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	620 Orang	620 Orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah UKM ber-NIB Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	400 UKM 100 UKM	330.000,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								844.220,955	1.182.220,955				810.661,614	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								844.220,955	1.182.220,955				810.661,614	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM terfasilitasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 UKM	35 UKM	265 Unit Usaha	265 Unit Usaha	265 UMKM	265 UMKM	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah UKM Mandiri	35 UKM	810.661,614

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										945,956,200	1,422,603,600		1,265,000,000			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI										851,085,250	1,363,731,750		1,165,000,000			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										851,085,250	1,363,731,750		1,165,000,000			
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Sumber Daya Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembudayaan Sumber Daya Industri	Dokumen perencanaan Industri	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	528.585.750	830.044.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	800.000.000
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen perencanaan Industri	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	75.495.000	342.742.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	120.000.000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen perencanaan Industri		11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	291.004.500	280.844.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	305.000.000
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI										9.060.000	9.060.000		20.000.000			
3	31	03	2.01		Penerapan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota										9.060.000	9.060.000		20.000.000			
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase IUI yang berijin Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan Industri	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	5 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase IUI yang berijin Industri	5 %	20.000.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										45,811,250	49,811,250		160,000,000			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota										45,811,250	49,811,250		160,000,000			
3	31	04	2.01	02	Dikemana: Rujukan Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	Jumlah Dokumen Hasil Diemulasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Data IUI yang terpublikasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.811.250	49.811.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Data Informasi industri yang ter-update	100 %	160.000.000
												TOTAL	3.164.432.357	11.574.914.664		11.376.321.589					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.0.00.01.0001 UPT Logam

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024									
						Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja							
						Keluaran Sub Register		Hasil Register		Sebelum	Setelah			Sebelum	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
3	31	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD																
3	31	01	2.10	01	Rajayanan dan Pemungut Pelayanan BLUD	Pendapatan UPT Logam	Jumlah BLUD yang Melayankan Rajayanan dan Pemungut Pelayanan	Layanan UPT Logam	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	625.110.000 rupiah	625.110.000 rupiah	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	640.000.000	440.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rendapatan UPT Logam	625.110.000 rupiah	440.000.000
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya Dokumen RENCANA dan realisasinya RENCANA dalam penyusunan Sertifikasi Industri Melalui Sistem Produk dan Teknik Industri Inovasi dan Pendampingan IKM	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 %	11 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.942.526.750	4.019.561.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	11 %	1.535.427.978
												TOTAL	4.372.595.750	4.459.561.600		1.975.427.978					

[Type here]

[Type here]

[Type here]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing.